



EDISI KAMIS 23 JULI 2026

H A R I A N

LENTERA*Inspirasi Perubahan***TODAY****02**

GOVERNMENTTODAY

Universitas Republik Indonesia: Ala INSP Prancis,
Cetak Pejabat dan Pimpinan BUMN**05**

NUSANTARA

Kejutan Gurita Korupsi Jatim
Dari Dana Hibah, Kebun Binatang hingga Cukai**10**

LISTSTYLE

Denim Look Ala Fashionista, Mewah yang Sederhana

DRAMA BOS BGN:

DUA KALI BERGANTI DALAM 45 HARI

Kini di Tangan Mantan Ajudan Prabowo, Sudaryono Sebut Tak Ada 'Hengki Pengki'

Badai rotasi kepemimpinan kembali menerjang Badan Gizi Nasional (BGN) dalam waktu singkat. Hanya dalam kurun 45 hari, posisi pucuk pimpinan pengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini telah dua kali mengalami pergantian hingga Rabu (22/7/2026) mencatatkan sosok ketiga di kursi kepala. Pengunduran diri mendadak Nanik S. Deyang dengan alasan perawatan medis penyakit jantung di luar negeri, seketika direspons Istana dengan pelantikan kilat Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Gonta-ganti bos dala program andalan pemerintah inipun terjadi di tengah bergulirnya pemeriksaan dugaan korupsi oleh Kejaksaan Agung. Pelantikan Sudaryono mempertegas kuatnya kendali lingkaran dalam kekuasaan atas kegiatan bernilai ratusan triliun rupiah tersebut. Langkah penunjukan mantan ajudan pribadi Prabowo Subianto yang merupakan politikus Partai Gerindra, sekaligus mantan Wakil Menteri Pertanian tersebut langsung memicu gelombang kritik tajam. Lembaga pemantau seperti MBG Watch menuding pelantikan ini sarat nepotisme dan minim meritokrasi gizi di tengah lonjakan puluhan ribu kasus keracunan siswa. Sementara itu, CELIOS dan Rumah Politik Indonesia menggarisbawahi adanya konflik kepentingan kepemilikan dapur SPPG oleh jejaring politik serta meragukan alibi medis di balik mundurnya Nanik. Mereka menyuarakan desakan yang sama dengan Ombudsman RI agar BGN berhenti melakukan akrobat birokrasi dan fokus membenahi mutu makanan di piring anak sekolah. **BACA HAL 11...**

Kepala BGN II (Jun - Jul 2026)

Nanik Sudaryati Deyang

- Eks jurnalis, politikus, eks Wakil Kepala BGN.
- Dilantik 2 Juni 2026.
- Memimpin sekitar 45 hari.
- Mundur 22 Juli 2026 untuk pengobatan jantung.

Kepala BGN III (22 Jul 2026-sekarang)

Dr. Sudaryono

- Lulusan National Defense Academy Jepang.
- Eks Wamentan & eks CEO Garuda TV.
- Dilantik 22 Juli 2026.
- Dipilih karena memahami rantai pasok pangan MBG.

Kepala BGN I (Ags 2024 - Jun 2026)

Dr. Ir. Dadan Hindayana

- Pakar entomologi, akademisi IPB.
- Dilantik 19 Agustus 2024.
- Membangun fondasi awal Program MBG.
- Dicapot 2 Juni 2026 terkait penyidikan dugaan korupsi tata kelola MBG.

**Jejak
Para
Kepala
BGN**



UNIVERSITAS REPUBLIK INDONESIA: ALA INSP PRANCIS, CETAK PEJABAT DAN PIMPINAN BUMN

Universitas Republik Indonesia (URI) yang dibentuk Presiden Prabowo Subianto akan mengadopsi konsep lembaga pendidikan kepemimpinan seperti Institut National du Service Public (INSP) di Prancis. Lembaga tersebut diproyeksikan menjadi pusat pembinaan calon pemimpin nasional, mulai dari pengembangan karakter, wawasan kebangsaan, hingga kemampuan manajerial bagi pejabat pemerintahan dan BUMN.

Gubernur URI, Marsenal TNI (Purn) Donny Ermawan Taufanto, mengatakan banyak negara telah memiliki lembaga serupa untuk menyiapkan pejabat publik. Menurutnya, Indonesia ingin membangun institusi dengan fungsi yang sejalan.

"Inilah yang digagas oleh beliau seperti halnya negara-negara tetangga kita juga mempunyai lembaga yang seperti yang kita ciptakan ini," kata Donny kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/7/2026).

Ia mencontohkan Prancis yang sebelumnya memiliki École Nationale d'Administration (ENA), yang kini bertransformasi menjadi Institut National du Service Public (INSP).

"Kalau di Prancis kita kenal ENA ataupun sekarang namanya INSP, itu adalah beberapa pejabat tinggi dari Prancis juga lulusan dari sekolah tersebut," ujarnya. Donny berharap URI mampu melahirkan pemimpin masa depan melalui pendidikan yang menitikberatkan pada pembentukan



karakter sekaligus penguatan kompetensi kepemimpinan.

"Kita akan mendidik, melatih baik karakternya ataupun pemikirannya, managerial skill akan kita berikan penanaman kepada mereka sehingga akan bisa menjadi pemimpin di masa depan," katanya.

Ia menjelaskan, Presiden Prabowo memberikan perhatian besar

terhadap pembangunan sumber daya manusia, khususnya dalam menyiapkan kader pemimpin bangsa.

"Bapak Presiden ini sangat concern dengan sumber daya manusia, terutama untuk pemimpin Indonesia di masa depan," ujar Donny.

Menurut dia, URI merupakan lembaga pendidikan yang difokuskan pada pengembangan SDM untuk



**Profil Gubernur URI:
Marsenal TNI (Purn.)
Donny Ermawan Taufanto**

- Lahir di Surakarta, 12 Desember 1965;
- purnawirawan bintang empat TNI AU.
- Menjabat sebagai Wakil Menteri Pertahanan RI.
- Lulusan terbaik AAU 1988 (Adhi Makayasa).
- Pernah menjadi Pangkopsau II dan Sekjen Kemhan.
- Harta kekayaan: Rp22,52 miliar (LHKPN Maret 2026).



**Profil Wakil Gubernur URI:
Prof. Yos Sunitiyoso, S.T.,
M.Eng., Ph.D.**

- Guru Besar SBM ITB bidang Pemodelan Keputusan Bisnis.
- Alumni ITB, Nagaoka University of Technology, dan University of the West of England.
- Pernah menjabat Direktur Hilirisasi dan Kemitraan Kemendikti-Saintek.
- Harta kekayaan: Rp5,10 miliar (LHKPN Maret 2026).

Gubernur URI Rangkap Jabatan Jadi Wamen Pertahanan, Didampingi Guru Besar ITB

DONNY mengatakan dirinya akan menjalankan kedua jabatan tersebut secara bersamaan karena memiliki keterkaitan, terutama dalam pembinaan bela negara dan wawasan kebangsaan. "Iya masih tetap Wamenhan ya. Ya masih merangkap," kata Donny kepada wartawan usai pelantikan.

Ia menjelaskan tugas sebagai Wakil Menteri Pertahanan masih beririsan dengan peran barunya sebagai Gubernur URI.

"Itu juga tetap kita juga ada di Kementerian Pertahanan. Ada tugas-tugas memberikan sosialisasi terkait dengan bela negara, wawasan kebangsaan, dan itu masih ada korelasinya," ujarnya.

Pada hari yang sama, Presiden Prabowo juga melantik Prof. Yos Sunitiyoso, Ph.D. sebagai Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia untuk mendampingi Donny memimpin lembaga pendidikan baru tersebut. Selain itu, Presiden turut

melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).

Dalam struktur kelembagaannya, Donny menjelaskan URI atau Badan Pengelola Pendidikan Kebangsaan akan membawahi tiga institusi, yakni Badan Pengelola Sekolah Unggulan, Badan Pengelola Perguruan Tinggi, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN).

Menurut Donny, LAN akan diperkuat dengan mandat baru. Selain membina aparatur sipil negara (ASN), lembaga tersebut juga akan bertanggung jawab menyiapkan sumber daya manusia di lingkungan badan usaha milik negara (BUMN).

"Lembaga Administrasi Negara ini, yang ada saat ini, akan diintegrasikan, tetapi akan ditambahkan tugas dan fungsinya. Akan diperkuat. Kalau selama ini melaksanakan khususnya pembinaan untuk ASN nantinya akan kita tambahkan juga untuk BUMN. Jadi persiapan karyawan untuk BUMN

akan dilaksanakan di Lembaga Administrasi Negara," kata Donny.

Ia menambahkan pembentukan URI merupakan bagian dari konsolidasi sistem pendidikan nasional yang diinisiasi Presiden Prabowo. Program tersebut mencakup pengembangan Sekolah Unggul Garuda dan rencana pendirian 10 Universitas Republik Indonesia di berbagai daerah.

"Ini semua terkait pendidikan pembinaan penyiapan SDM untuk ke depan, untuk pemerintahan maupun untuk BUMN," ujarnya.

Sosok yang mendampingi Donny adalah Prof. Yos Sunitiyoso, guru besar bidang Pemodelan Keputusan Bisnis di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB) yang dikukuhkan pada 2025. Ia juga merupakan alumnus SMA Taruna Nusantara angkatan IV (Tn4). (tin,ist/dya)



Presiden Prabowo Subianto melantik tiga pejabat utama, Rabu (22/7/2026). Pejabat tersebut adalah Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), serta Donny Ermawan Taufanto dan Yos Sunitiyoso masing-masing sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia. (dok. biro setpres)

KUNTADI RESMI JADI JAMPIDSUS, DPR INGATKAN TARUHAN INDEPENDENSI KEJAKSAAN DI KASUS FEBRIE

Penunjukan Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menjadi sorotan publik di tengah bergulirnya penyidikan dugaan korupsi yang menjerat pendahulunya, Febrie Adriansyah. Selain menandai pergantian pucuk pimpinan di bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Agung, pengangkatan tersebut juga dinilai menjadi ujian bagi independensi institusi Adhyaksa dalam menangani perkara yang melibatkan mantan pejabat internalnya.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai Kuntadi memiliki rekam jejak dan integritas yang memadai untuk memimpin Jampidsus. Namun, ia mengingatkan bahwa kepercayaan publik hanya dapat dibangun apabila penanganan perkara Febrie dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa kompromi.

"Sangat baik sekali Kuntadi jadi Jampidsus pengganti Febrie. Saya kenal dia punya integritas kuat yang bisa selesaikan perkara mantan Jampidsus," kata Sahroni, Rabu (22/7).

Politikus Partai NasDem itu secara khusus mengingatkan agar Kuntadi tidak melakukan kompromi dalam menangani perkara yang menjadi perhatian publik tersebut.

"Pak Kuntadi pesan saya jangan main mata di perkara besar ini dan buktikan pada masyarakat bahwa kejaksaan independen dan bisa selesaikan perkara ini dengan cepat serta cepat juga hadirkan ke publik mantan Jampidsus," ujarnya.

Pernyataan tersebut muncul sehari



setelah Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan Kuntadi sebagai Jampidsus melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 87/TPA Tahun 2026. Dalam keputusan yang sama, Presiden juga melakukan rotasi terhadap sejumlah pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kejaksaan Agung.

Selain Kuntadi, Presiden mengangkat Asep Nana Mulyana sebagai Wakil Jaksa Agung, Leonard

Ebenezer Simanjuntak sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), Harli Siregar sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung, serta Patris Yusrian Jaya sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan pengangkatan tersebut merupakan

SIAPA DR. KUNTADI, S.H., M.H?

Perjalanan Karier

- **1996:**
Memulai karier di Kejaksaan Agung.
- **2012-2019:**
Koordinator Kejati DKI, Kajari Lubuklinggau & Jakarta Pusat, Kasubdit Jamintel.
- **2019-2022:**
Asisten Umum Jaksa Agung.
- **2022-2024:**
Direktur Penyidikan Jampidsus.
- **2024-2025:**
Kajati Lampung, lalu Kajati Jawa Timur.
- **Nov 2025-Juli 2026:**
Kepala Badan Pemulihan Aset.
- **Juli 2026-Sekarang:**
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).

Kasus Besar yang Ditangani

- Korupsi Tata Niaga Timah (kerugian hingga Rp300 triliun).
- Korupsi BTS 4G Kominfo (kerugian sekitar Rp8 triliun).
- Korupsi Ekspor CPO (kerugian sekitar Rp20 triliun).



Demo di Depan Kejaksaan Berujung Ricuh

AKSI unjuk rasa yang menuntut keterbukaan penanganan perkara mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah berujung ricuh di depan Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Rabu (22/7). Kericuhan dipicu saat aparat mengamankan atribut demonstrasi yang hendak dibakar, sehingga terjadi aksi saling dorong antara massa dan petugas.

Massa yang mengatasnamakan Jaringan Intelektual Hukum Nasional (JIHN) sebelumnya menggelar aksi di depan kantor Kejaksaan Agung di Jalan Panglima Polim, Kebayoran Baru. Dalam demonstrasi tersebut, peserta aksi membakar ban dan memblokir sebagian Jalan Panglima Polim menuju kawasan Senayan sehingga arus lalu lintas sempat tersendat.

Polisi kemudian memadamkan api ban yang dibakar serta mengamankan sejumlah spanduk

dan perlengkapan aksi. Upaya tersebut memicu ketegangan sekitar pukul 15.30 WIB. Sejumlah demonstran berusaha mempertahankan atribut mereka, sementara beberapa peserta aksi terlihat melempar botol ke arah petugas.

Aparat kepolisian tetap berjaga di depan gerbang Kejaksaan Agung untuk mencegah massa memasuki kompleks perkantoran. Polisi juga meminta demonstran membuka blokade jalan agar kendaraan dapat kembali melintas.

Setelah dilakukan negosiasi, massa mengurangi penutupan jalan dan melanjutkan orasi di depan gedung Kejaksaan Agung. Hingga aksi berakhir, tidak ada laporan mengenai korban maupun peserta demonstrasi yang diamankan.

Dalam orasinya, Direktur Jaringan Intelektual Hukum Nasional, Riswan Siahaan, mendesak Kejaksaan Agung memberikan

penjelasan kepada publik mengenai perkembangan penanganan perkara yang menyeret nama Febrie Adriansyah.

"Kami berharap tidak ada hukum yang tumpul," kata Riswan.

Menurut dia, keterbukaan proses hukum diperlukan untuk menghindari anggapan adanya perlakuan berbeda dalam penegakan hukum. Massa juga meminta Jaksa Agung menyampaikan secara terbuka status hukum perkara tersebut.

Selain mendesak Kejaksaan Agung, demonstran meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengusut perkara tersebut secara terbuka dan independen. Mereka menilai penyelidikan yang menyeluruh diperlukan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pihak lain selain nama-nama yang telah muncul dalam perkara.(wid,ist/dya)

tindak lanjut atas usulan Jaksa Agung yang telah melalui mekanisme Tim Penilai Akhir (TPA).

"Presiden telah menandatangani Keppres sesuai hasil Tim Penilai Akhir sebagaimana mengacu pada surat usulan dari Jaksa Agung," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Sebelum Keppres diterbitkan, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pergantian Jampidsus sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden berdasarkan usulan Jaksa Agung.

Menurut Dasco, DPR menghormati mekanisme tersebut karena pengisian jabatan di lingkungan Kejaksaan Agung merupakan ranah eksekutif.

"Kalau menurut kewenangan, menurut kami itu kan kewenangan dari Presiden yang kemudian mendapat usulan dari Jaksa Agung," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Sementara itu, beberapa hari sebelum Keppres diterbitkan, Mensesneg Prasetyo Hadi telah memberi sinyal bahwa proses administrasi pengangkatan Jampidsus baru akan segera rampung. (tin,ist,kum/dya)

KEJUTAN GURITA KORUPSI JATIM

Dari Dana Hibah, Kebun Binatang hingga Cukai

Penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi di Jawa Timur memasuki babak yang semakin intensif. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur mengungkap tiga perkara besar yang menyentuh sektor berbeda. Kasus pertama merupakan pengembangan perkara dugaan suap pengelolaan dana hibah Kelompok Masyarakat (Pokmas) APBD Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2019–2022. Perkara kedua berkaitan dengan dugaan korupsi pengelolaan anggaran di Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTs) Kebun Binatang Surabaya. Sementara perkara ketiga menyasar dugaan penerimaan gratifikasi dan suap dalam pelayanan dokumen impor di lingkungan Bea Cukai Kediri. Miris.

TIGA WAJAH PERBURUAN RENTE DI JAWA TIMUR

- Suap Hibah Pokmas Jatim:**
 KPK menahan 3 tersangka swasta (AY, MF, RWR) sebagai pemberi suap dana hibah APBD Jatim 2019–2022.
- PDTs KBS Surabaya:**
 Kejati Jatim menahan mantan Dirut CA atas dugaan penyimpangan anggaran dan laporan fiktif Rp10,2 miliar.
- Bea Cukai Kediri:**
 KPK menetapkan Kepala Bea Cukai Kediri Gatot Heroe Hernanda sebagai tersangka gratifikasi dan suap dokumen impor.



Tersangka kasus dugaan korupsi dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Achmad Yahya (kiri), Ra Wahid Ruslan (kedua kiri), dan M. Fathullah (kedua kanan) mengenakan rompi tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/7/2026). (antara)

Dari tiga perkara tersebut, penyidikan kasus dana hibah Pokmas menjadi yang paling menyita perhatian. Pada Rabu (22/7), KPK kembali menahan tiga tersangka baru dari pihak swasta, mengungkap dugaan aliran suap Rp6,9 miliar kepada anggota DPR RI Anwar Sadad, serta menyita aset senilai sekitar Rp22 miliar yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Ketiganya merupakan pihak swasta yang diduga berperan sebagai pemberi suap, yakni Achmad Yahya (AY), M. Fathullah (MF), dan Ra. Wahid Ruslan (RWR).

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan penahanan dilakukan setelah ketiganya menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

"Pada hari ini, Rabu, 22 Juli 2026, KPK melakukan penahanan terhadap tiga tersangka pihak pemberi," kata Taufik dalam konferensi pers.

Ketiga tersangka kemudian ditahan selama 20 hari pertama, terhitung sejak 22 Juli hingga 10 Agustus 2026, di Rumah Tahanan Cabang Gedung Merah Putih KPK.

"Terhadap ketiga tersangka tersebut, dilakukan penahanan untuk 20 hari pertama, terhitung sejak tanggal 22 Juli sampai dengan 10 Agustus 2026 di Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK," ujarnya.

Penyidik menjerat ketiganya dengan

Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Perkara ini merupakan pengembangan kasus dugaan suap dana hibah Pokmas yang bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Desember 2022 terhadap Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024 Sahat Tua Simanjuntak. Dalam pengembangannya, KPK mengumumkan penetapan 21 tersangka pada Oktober 2025. Namun, penyidikan terhadap mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi dihentikan pada Desember 2025 setelah yang bersangkutan meninggal dunia sehingga kini tersisa 20 tersangka yang diproses.

Menurut KPK, ketiga tersangka baru tersebut diduga memberikan uang kepada Anwar Sadad, anggota DPR RI periode 2024–2029 yang saat dugaan tindak pidana terjadi menjabat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur periode 2019–2024. Penyerahan uang dilakukan melalui staf Anwar Sadad, Bagus Wahyudiono (BGS).

Dalam konstruksi perkara KPK, uang tersebut disebut sebagai uang "ijon", yakni dana yang diberikan di awal untuk memperoleh kepastian alokasi dana

hibah.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengungkapkan nilai keseluruhan uang yang diduga diterima mencapai Rp6,9 miliar.

"AS melalui BGS diduga menerima ijon yang diterima di awal sekurangnya untuk jumlahnya itu sebesar Rp6,9 miliar," kata Taufik.

KPK merinci, Achmad Yahya diduga menyerahkan uang Rp1,87 miliar untuk memperoleh alokasi dana hibah sebesar Rp14,8 miliar. M. Fathullah diduga memberikan Rp3,61 miliar demi memperoleh alokasi hibah senilai Rp24 miliar. Sementara Ra. Wahid Ruslan diduga menyerahkan Rp1,42 miliar untuk memperoleh alokasi hibah sebesar Rp28,9 miliar.

Dengan demikian, total uang yang diduga diterima Anwar Sadad melalui Bagus Wahyudiono mencapai Rp6,9 miliar, sedangkan total nilai dana hibah yang diduga diamankan melalui praktik tersebut mencapai sekitar Rp67,7 miliar.

Sebelum menahan tiga tersangka tersebut, KPK telah lebih dahulu menahan empat tersangka pemberi suap lainnya, yakni Hasanuddin, Jodi Pradana Putra, Sukar, dan Wawan Kristiawan. Dengan tambahan tiga tersangka baru, hingga Rabu (22/7) KPK telah menahan tujuh tersangka dari kelompok pemberi suap.

Selain melakukan penahanan terhadap tiga tersangka baru, KPK juga menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan aliran dana hasil tindak pidana korupsi. Nilai keseluruhan aset yang telah disita mencapai sekitar Rp22 miliar dan berasal dari anggota DPR RI Anwar Sadad serta stafnya, Bagus Wahyudiono.

Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein mengatakan penyitaan dilakukan sebagai bagian dari upaya pemulihan aset sekaligus menelusuri hasil kejahatan yang diduga dinikmati para tersangka.

"Dalam perkara ini, KPK juga telah melakukan penyitaan terhadap aset-aset milik AS dan BGS dengan total nilai kurang lebih Rp22 miliar," ujar Taufik.

Aset yang disita terdiri atas satu bidang tanah di Kota Surabaya senilai Rp4,5 miliar; dua unit rumah toko (ruko) di Surabaya senilai Rp3 miliar; satu unit rumah di Surabaya senilai Rp4 miliar; satu unit apartemen di Kota Malang senilai Rp1 miliar; satu gelanggang olahraga di Kabupaten Probolinggo senilai Rp3 miliar; satu Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) di Kabupaten Banyuwangi senilai Rp2 miliar; satu unit rumah di Surabaya senilai Rp2 miliar; satu unit rumah di Kabupaten Mojokerto senilai Rp500 juta, serta satu unit rumah di Kabupaten Pasuruan senilai Rp2 miliar. (wid, ant, ist, kum, dya)

Selewengkan Dana KBS, Mantan Dirut Choirul Ditahan Kejati

Penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan keuangan di tubuh BUMD ikonik Kota Pahlawan, Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDBS KBS), resmi memasuki fase penindakan. Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menetapkan mantan Direktur Utama PDBS KBS periode 2016–2024, Choirul Anwar (CA), sebagai tersangka dan langsung dijebloskan ke sel tahanan pada Selasa (21/7/2026) malam.

Penetapan tersangka didasarkan pada Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor KEP-863/M.5/Fd.2/07/2026 tertanggal 21 Juli 2026. Guna kepentingan penyidikan mendalam, CA ditahan untuk 20 hari pertama terhitung mulai 21 Juli hingga 9 Agustus 2026 di Cabang Rumah Tahanan (Rutan) Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Berdasarkan hasil penyidikan Kejati Jatim bersama audit perhitungan sementara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jawa Timur, praktik pembancakan dana internal ini berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, yakni kurun 2013 hingga 2024.

Perbuatan tersangka diperkirakan telah menimbulkan kerugian keuangan negara atau PDBS KBS sebesar Rp10.209.664.735,60.

Dalam menjalankan aksinya, tersangka CA yang menjabat sebagai orang nomor satu di PDBS KBS sejak 2016 diduga kuat menyalahgunakan kewenangannya dengan memerintah bawahan untuk mencairkan kas perusahaan di luar prosedur baku formal.

Asisten Tindak Pidana Khusus



(Aspidsus) Kejati Jawa Timur, I Gede Punia Atmaja mengatakan, "Tersangka CA selaku mantan Direktur Utama diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan menggunakan anggaran perusahaan untuk pengeluaran yang tidak sesuai peruntukan, bersifat fiktif, serta diduga digunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam prosesnya, CA memerintah Kepala Departemen Accounting and Finance berinisial STN untuk mengeluarkan dana sekaligus membuat dokumen pertanggungjawaban seolah-olah untuk kebutuhan operasional. Khusus pada periode 2023–2024, pengeluaran kas yang tidak sah tersebut juga mendapat persetujuan dari Direktur Keuangan PD KBS berinisial MN."

Kesejahteraan Binatang Terancam

Dampak dari perbuatan jahat ini tidak hanya merugikan finansial daerah secara signifikan, melainkan merembet langsung pada kualitas pengelolaan kebun binatang tertua di Indonesia

tersebut. Imbas dari pengeluaran kas fiktif ini membuat alokasi pemeliharaan riil menjadi berkurang drastis, yang mengakibatkan sejumlah fasilitas pengunjung tidak terawat hingga kondisi kesejahteraan satwa yang dinilai tidak memperoleh perawatan secara optimal.

"Ada temuan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, catatannya ada tetapi uangnya tidak ada. Karena ini uang rakyat, uang PAD, uang negara, maka siapa pun yang menggunakan itu wajib hukumnya mempertanggungjawabkan. Prinsip saya tegas: siapa yang salah, ya seleh (harus meletakkan jabatan dan memproses hukum)," kata Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.

Atas perbuatannya, tersangka CA dijerat dengan Pasal 603 subsider Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juncto ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001. Pihak Kejati Jatim menegaskan pengembangan penyidikan masih terus berjalan untuk mendalami peran pejabat internal lain yang turut memberi persetujuan atas pencairan dana tak sah tersebut. (ama,ist,dtc/dya)

KORUPSI KEBUN BINATANG SURABAYA

Tersangka

- Choirul Anwar (CA), mantan Dirut PDBS KBS (2016–2024).
- Ditetapkan tersangka 21 Juli 2026.

Kerugian Negara

- Rp10,2 miliar
- Diduga dinikmati tersangka: ±Rp7,4 miliar

Modus

- Manipulasi anggaran & LPJ fiktif.
- Pemotongan anggaran pakan satwa.
- Penyalahgunaan dana operasional.
- Memanfaatkan rangkap jabatan mengendalikan keuangan.

Rangkap Tiga Jabatan

- Choirul Anwar diduga merangkap sebagai:
 - Direktur Utama/Direktur
 - Bisnis/Operasional
 - Direktur Keuangan

Awal Terungkap

- Dicurigai setelah ditemukan selisih kas sekitar Rp8 miliar.
- Tercatat dalam laporan keuangan, tetapi uang fisiknya tidak tersedia.
- Pemkot Surabaya melanjutkan audit independen terhadap pengelolaan keuangan KBS.

Proses Hukum

- Ditahan di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jatim.
- Masa penahanan awal 20 hari.
- Penyidik masih mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.



Tersangka Baru Korupsi Impor: Kepala Kantor Bea Cukai Kediri

KPK mengungkapkan tersangka baru dalam perkara dugaan korupsi impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan (KPP) Bea dan Cukai Kediri, Gatot Heroe Hernanda dikatakan sudah ada di surat perintah penyidikan.

"Jadi kalau memang itu sudah disampaikan yang bersangkutan atau John Field, ya itu, betul, itu sudah ada surat perintah penyidikan terhadap yang bersangkutan (Gatot Heroe)," ujar Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Hussein saat dikonfirmasi soal sosok tersangka baru tersebut adalah Gatot Heroe, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/7).

Sebelumnya, informasi mengenai

status Gatot Heroe sebagai tersangka diungkapkan oleh bos PT BlueRay Cargo, John Field, usai menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung Merah Putih KPK pada hari yang sama.

John Field yang dalam kasus ini telah divonis sebagai pihak yang memberikan suap, mengungkapkan bahwa dirinya diperiksa sebagai saksi terkait tersangka atas nama Gatot Heroe.

"Saksi, saksi. (Untuk tersangka) Pak Gatot," kata John kepada wartawan saat ditanya mengenai statusnya dalam pemeriksaan tersebut.

KPK sebelumnya telah menerbitkan dua sprindik baru dalam pengembangan perkara dugaan korupsi impor di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dua sprindik tersebut

merupakan hasil pengembangan penyidikan serta telaah terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan perkara sebelumnya.

"Hasil pengembangan penyidikan dan telaah hasil persidangan, itu kita menerbitkan dua sprindik," kata Plt Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Hussein kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (21/7).

Taufik menjelaskan, pada salah satu klaster yang berkaitan dengan pejabat Bea Cukai, KPK telah menetapkan seorang tersangka terkait konstruksi perkaranya.

"Satu klaster yang Bea Cukai itu sudah kita tetapkan tersangkanya. Ada satu, karena masih terkait dengan konstruksi perkara pejabat Bea Cukai-

nya, jadi kita langsung tetapkan," ucapnya.

Sementara itu, sprindik lainnya masih berada pada tahap penyidikan umum. KPK belum menetapkan tersangka karena penyidik masih melengkapi alat bukti.

"Klaster yang kedua masih terkait kepentingan apa, pejabat Bea Cukai tetapi ini peristiwanya berbeda. Nah, itu yang kita kemudian masih satu sprindik untuk kita tetapkan sprindik umum. Artinya nanti kita akan tetapkan tersangka setelah kecukupan dua alat buktinya di proses penyidikannya," tutur Taufik. (ist,kum/dya)

DPRD Kota Malang Soroti Dana Cukai Rp14,9 Miliar Tak Terserap



Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita. (Santi/Lentera)

MALANG - Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) senilai sekitar Rp14,9 miliar di Kota Malang tidak terserap dan menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di Tahun Anggaran 2025. Menyikapi kondisi itu, DPRD akan berkonsultasi dengan pemerintah pusat agar pemanfaatannya bisa lebih fleksibel.

"Kami berencana konsultasi ke Kemenkeu. Nanti saya akan coba cari

jalan. Pertama yang pasti harus ke Kemendagri dulu, di Dirjen Bangda, baru nanti kami langsung ke Kemenkeu untuk menyampaikan hal-hal itu," ujar Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, Rabu (22/7/2026).

Menurutnya, besarnya SiLPA DBHCHT bukan hanya terjadi pada tahun anggaran 2025, tetapi telah berulang dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut terjadi karena ruang pemanfaatan dana DBHCHT, termasuk sasaran para pekerja pabrik rokok di Kota Malang dinilai terbatas sehingga anggaran tidak dapat terserap secara maksimal.

"Karena memang SiLPA-nya dari DBHCHT ini berulang, dari beberapa tahun silam itu berulang dan tidak mampu diserap. Karena memang sasarannya itu tidak banyak di Kota

Malang. Makanya kami konsultasikan dengan pusat, harapannya bisa digunakan seoptimal mungkin," katanya.

Amithya menegaskan, konsultasi tersebut akan dilakukan secepatnya. Namun, politisi Partai PDI Perjuangan ini mengakui perubahan kebijakan tidak bisa dilakukan secara instan karena tetap harus melalui mekanisme dan proses di pemerintah pusat.

"Sesegera mungkin kami konsultasikan. Tetapi pasti tidak mungkin itu tidak ada proses berikutnya. Tidak cuma hanya karena kami konsultasi kemudian 'cling' bisa selesai, kami harus melihat prosesnya juga seperti apa nanti setelah konsultasi itu," katanya.

Sebelumnya, persoalan tingginya SiLPA DBHCHT juga menjadi perhatian Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang dalam pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, Selasa (21/7/2026).

Dalam rekomendasi-dasarnya, Banggar menilai besarnya SiLPA yang

bersumber dari DBHCHT pada sejumlah perangkat daerah, mulai dari Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan perangkat daerah lainnya, menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pola penganggaran dan penyerapan anggaran.

DPRD pun mendorong Pemerintah Kota Malang agar lebih proaktif membangun komunikasi dengan pemerintah pusat guna mengusulkan perubahan kebijakan pemanfaatan DBHCHT.

"Kami mendorong Pemerintah Kota Malang proaktif membangun komunikasi dan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar peruntukan alokasi DBHCHT lebih fleksibel dan sesuai keadaan di Kota Malang," ujar Juru Bicara Banggar DPRD Kota Malang, Lelly Theresiawati.

Banggar juga menilai besarnya SiLPA DBHCHT yang terus terjadi setiap tahun berpotensi menimbulkan persepsi terkait perencanaan, penganggaran, dan penyerapan anggaran pada perangkat daerah belum berjalan secara optimal. (Santi/Dya)

Dikejar Deadline Akhir 2026, Proyek PSEL Malang Masih Terganjil Lahan

MALANG - Proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kabupaten Malang masih terkendala lahan. Setelah gagal di Pakis dan Bululawang, Pemkab Malang dikejar deadline pemerintah pusat hingga akhir 2026.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, mengungkapkan hingga kini belum ada kepastian lokasi pengganti. Padahal, pemerintah pusat menargetkan seluruh proses penentuan lahan rampung paling lambat Desember 2026.

"Target dari Pemerintah Pusat, akhir tahun ini harus sudah ada lahannya. Kami berupaya secepatnya mencari opsi terbaik," ujar Dzulfikar, dikutip pada Rabu (22/7/2026).

Seperti diketahui, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) RI telah menetapkan Kabupaten Malang sebagai salah satu lokasi pembangunan PSEL aglomerasi wilayah Malang Raya. Karena itu, Pemkab Malang mendapat tugas menyiapkan lahan yang memenuhi

persyaratan teknis.

Awalnya, pemerintah daerah mengusulkan lahan seluas sekitar enam hektare di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, yang berada di dekat exit Tol Pakis. Lokasi tersebut bahkan sempat ditinjau langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup saat itu, Hanif Faisol.

Namun, rencana itu kandas setelah diketahui lahan tersebut berada di kawasan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) Lanud Abdulrachman Saleh, sehingga tidak memungkinkan untuk dijadikan lokasi pembangunan PSEL.

Setelah opsi di Pakis gugur, Pemkab Malang mengalihkan usulan ke Desa Sempalwadak, Kecamatan Bululawang. Sayangnya, rencana tersebut juga tidak dapat dilanjutkan akibat penolakan warga.

Masyarakat menilai lokasi PSEL terlalu dekat dengan kawasan permukiman sehingga dikhawatirkan berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Meski DLH telah memberikan penjelasan dan menunjukkan contoh pengelolaan

PSEL di sejumlah negara, kekhawatiran warga belum sepenuhnya terjawab.

"Kami sudah memberikan contoh penerapan PSEL di negara lain, tetapi masyarakat masih memiliki kekhawatiran terhadap dampak lingkungannya," jelas Dzulfikar.

Akibat dua kali gagal mendapatkan lokasi, Pemkab Malang kini kembali menetapkan sejumlah wilayah yang dinilai memiliki potensi untuk menjadi lokasi baru. Beberapa kecamatan yang masuk dalam kajian antara lain Wajak, Wagir, dan Singosari.

Menurut pria yang akrab dengan sapaan Afi ini, wilayah-wilayah tersebut dinilai masih memiliki ketersediaan lahan yang cukup luas dan lokasinya relatif strategis karena tidak terlalu jauh dari Kota Malang maupun Kota Batu.

Meski demikian, proses penentuan lokasi diperkirakan tidak



Ilustrasi: Pemilahan sampah di TPS 3R Mulyoagung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. (Santi/Lentera)

dapat dilakukan dalam waktu dekat. "Sampai saat ini belum ada kepastian lahan. Bisa di Wajak, Wagir, atau Singosari. Dalam waktu satu bulan ini sepertinya kami masih belum bisa," katanya.

Afi menjelaskan, penetapan lokasi baru harus melalui sejumlah tahapan, mulai dari sosialisasi kepada masyarakat melalui musyawarah desa (musdes), hingga verifikasi teknis oleh kementerian sebelum lahan dapat ditetapkan secara resmi. (Santi/Dya)



Perdana Menteri Inggris yang baru, Andy Burnham, saat memberikan pidato pertama setelah menjabat, di depan Downing Street, London, 20 Juli 2026. (AFP)

PM BARU INGGRIS IZINKAN AS PAKAI PANGKALAN MILITERNYA UNTUK SERANG IRAN

Perdana Menteri (PM) Inggris yang baru dilantik, Andy Burnham, resmi memberikan izin bagi Angkatan Bersenjata Amerika Serikat (AS) memanfaatkan pangkalan militernya untuk melakukan tindakan defensif terhadap Iran. Langkah ini menjadi penegas bila Burnham melanjutkan kebijakan pertahanan pendahulunya, mantan Perdana Menteri Keir Starmer.

Persetujuan tersebut mencakup penggunaan pangkalan militer strategis Inggris di Diego Garcia yang berlokasi di Samudera Hindia, serta pangkalan militer RAF Fairford yang terletak di Gloucestershire, Inggris. Pangkalan-pangkalan vital ini disiapkan untuk memfasilitasi armada udara Amerika Serikat dalam menjalankan berbagai misi tempur, khususnya yang bertujuan membendung ancaman rudal Iran serta melumpuhkan situs-situs yang mengancam jalur pelayaran di Selat Hormuz.

Keputusan Burnham ini pada dasarnya mengakar dari hasil rapat penting yang sebelumnya dipimpin oleh Keir Starmer pada Jumat lalu. Pertemuan yang melibatkan para menteri dan pejabat senior Inggris tersebut digelar untuk merumuskan respons resmi London menyusul dimulainya kembali gelombang serangan Amerika Serikat ke Iran pada awal bulan ini. Hasil pembahasan saat itu menyepakati untuk mempertahankan kebijakan yang sudah ada terkait izin pangkalan militer.

Sebagaimana dilaporkan oleh media Al Arabiya, Andy Burnham yang resmi memegang tampuk kepemimpinan pada Senin lalu langsung menerima pembekalan mengenai isi pertemuan tersebut dan menyetujui keputusan yang telah diambil. Dengan persetujuan ini, pemerintah Inggris di bawah kepemimpinan Burnham memastikan bahwa pangkalan-pangkalan mereka berpeluang besar langsung digunakan dalam menyokong beberapa operasi

militar Amerika Serikat yang sedang berlangsung saat ini.

Pemberian izin penggunaan pangkalan militer ini mengemuka di tengah eskalasi konflik yang kini telah memasuki hari ke-10. Komando Pusat Amerika Serikat mengonfirmasi

eskalasi tersebut dengan menyatakan bahwa pihaknya, "telah menargetkan pusat komando militer Iran, lokasi peluncuran, dan pertahanan udara dalam serangan terbaru AS."

Sikap tegas Burnham mengenai kerja sama militer ini juga tercermin

dalam pembicaraan telepon yang dilakukannya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump tidak lama setelah ia dilantik. Dilansir dari AFP, juru bicara resmi Burnham mengungkapkan komitmen utama sang Perdana Menteri. "Memastikan keamanan Inggris dan sekutunya adalah prioritas utamanya," kata juru bicaranya saat menjelaskan isi pembicaraan tersebut dikutip Rabu (22/7/2026). Ditambahkan, Burnham turut mengundang Donald Trump untuk berkunjung ke kota kelahirannya di Manchester.

Kendati demikian, keputusan Burnham untuk memfasilitasi operasi militer Amerika Serikat diperkirakan tidak akan berjalan tanpa kendala di dalam negeri. Burnham berpotensi menghadapi gelombang kritik tajam dari kalangan politik sayap kiri, khususnya Partai Hijau dan Partai Liberal Demokrat.

Kedua partai politik tersebut menolak keras penggunaan pangkalan Inggris untuk serangan ke Iran karena berpandangan bahwa keterlibatan tersebut berisiko menyeret Inggris ke dalam tuduhan kejahatan perang.

Di sisi lain, tekanan finansial akibat konflik di Timur Tengah ini kian mencolok setelah Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, memberikan keterangan resminya. Hegseth mengungkapkan secara terbuka bahwa perang melawan Iran telah menyedot anggaran fantastis sebesar US\$ 37,5 miliar atau setara Rp 671,7 triliun sejauh ini. (gus,ist,rtr/dya)

Trump Ancam Bombardir Gunung Pickaxe, 7 Tanker Minyak Saudi Ubah Rute di Laut Merah

KETEGANGAN antara As dan Iran makin tidak terkendali setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan ancaman militer terbuka terhadap situs nuklir rahasia Iran. Eskalasi konflik yang kian membara ini berimbas langsung pada krisis energi global, yang ditandai dengan terganggunya rute kapal-kapal tanker pengangkut minyak di kawasan Laut Merah.

Presiden Donald Trump secara terang-terangan mengancam akan membombardir Gunung Pickaxe di Iran, lokasi yang diyakini menyimpan kompleks nuklir bawah tanah yang dirahasiakan. Situs yang terletak jauh di kedalaman tanah dekat kompleks Natanz tersebut dicurigai intelijen Barat dan laporan Israel menjadi tempat Teheran menyembunyikan ribuan sentrifugal serta fasilitas pengayaan uranium tanpa deklarasi resmi.

Ancaman keras tersebut

disampaikan Trump saat menjawab pertanyaan wartawan di Gedung Putih pada Selasa (21/7/2026) waktu setempat. "Kita akan menghantam area tersebut dalam waktu dekat, dan dengan sangat dahsyat," ujar Trump sebagaimana dilansir AFP dan Al Jazeera. Ia menekankan bahwa rencana aksi militer tersebut tidak dapat dihalangi oleh pihak manapun.

"Mungkin dalam waktu dekat, dan tidak ada yang bisa mereka lakukan untuk mencegahnya," ucap Trump, sebelum menambahkan, "Biasanya, saya tidak mengatakan hal tersebut. Jika saya pikir mereka bisa berbuat sesuatu soal itu, saya tidak akan pernah mengatakannya, tetapi kita meyakini akan menghantam area tersebut dalam waktu dekat, dan dengan sangat dahsyat."

Kendati mengakui Washington belum memegang konfirmasi resmi, Trump meyakini pemindahan sentrifugal telah terjadi. "Menurut saya mungkin saja mereka sudah

melakukannya. Kami tidak memiliki catatannya," ungkap Trump kepada Anadolu Agency. Pernyataan ini mempertegas gertakan Trump sebelumnya di The Hugh Hewitt Show, di mana ia menyatakan "akan menaklukkan Gunung Pickaxe" dan meminta agar "beri tahu pihak Iran agar bersiap."

Makin tertutupnya pintu diplomasi juga ditegaskan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, dalam pertemuan menteri luar negeri ASEAN di Manila pada Rabu (22/7/2026). Rubio menilai Teheran tidak menunjukkan komitmen untuk menghentikan perang. "Masalah yang kami hadapi saat ini adalah mereka tidak serius untuk berunding. Jika mereka serius, kami juga serius. Jika tidak, kami akan melakukan apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan kami dan sekutu kami," tegas Rubio. (tin,ist/dya)

Konsumsi Buah Sebelum Makan Antara Nutrisi dan Batas Toleransi

Praktik mengonsumsi buah sebelum menyantap makanan utama kini kian populer di kalangan masyarakat yang sadar akan kesehatan. Metode ini dinilai efektif untuk menstimulasi rasa kenyang lebih awal guna mengontrol porsi makan,

sekaligus mengoptimalkan penyerapan mikronutrien oleh tubuh. Kendati demikian, bagi individu dengan sistem pencernaan yang sensitif, kekhawatiran akan lonjakan asam lambung sering kali menjadi hambatan dalam menerapkan pola kebiasaan ini.

Edukasi klinis dari para pakar nutrisi menegaskan bahwa mengonsumsi buah saat perut kosong pada dasarnya aman, dengan catatan pemilihan jenis buah dan tingkat kematangannya dilakukan secara selektif.

Buah-buahan dengan tingkat keasaman tinggi (high-acidity) seperti jeruk nipis, lemon, nanas, atau buah yang belum matang sempurna secara mekanis dapat mengiritasi dinding lambung.

Sebagai alternatif, buah dengan pH yang lebih netral atau rendah asam seperti pisang, pepaya, melon, dan semangka jauh lebih adaptif bagi lambung. Pisang kaya

akan serat dan kalium yang menjaga stabilitas pencernaan, sementara pepaya mengandung enzim papain yang aktif membantu mengurai protein di dalam saluran cerna.

Faktor krusial lain yang memengaruhi kenyamanan lambung adalah fase kematangan buah. Secara biokimia, buah yang telah matang sempurna mengalami konversi pati menjadi karbohidrat sederhana sehingga struktur seratnya lebih lunak dan mudah dicerna. Sebaliknya, buah mentah terbukti memiliki akumulasi asam organik dan senyawa kompleks yang tinggi.

Berdasarkan studi yang dirilis dalam jurnal Horticulture Research, karakteristik buah mentah ini rentan memicu distensi lambung yang bermanifestasi sebagai rasa perih, begah, atau kembung pada kelompok individu dengan lambung sensitif.

Terkait kuantitas, Pedoman Gizi Seimbang Kementerian Kesehatan RI merekomendasikan porsi konsumsi buah harian idealnya berkisar antara 2 hingga 3 porsi per hari secara bertahap.

Mengonsumsi buah secara masif dalam satu waktu, khususnya saat perut dalam kondisi kosong, justru akan memberikan beban kerja berlebih pada lambung. Fleksibilitas waktu konsumsi, baik sebelum maupun sesudah makan, sebenarnya tidak mengganggu fungsi sekresi pencernaan,

mengingat sistem gastrointestinal manusia telah dirancang secara sistemis untuk mengolah berbagai makronutrien secara simultan.

Namun, perhatian khusus tetap harus diberikan pada kelompok dengan kondisi medis tertentu yang membutuhkan penyesuaian pola konsumsi. Penderita penyakit asam lambung kronis atau Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) sangat diwajibkan untuk memantau dan mengenali batas toleransi personal terhadap jenis buah yang dikonsumsi. Buah-buahan dengan tingkat keasaman tinggi seperti jeruk, lemon, nanas, atau tomat dapat merangsang produksi asam lambung berlebih serta memicu relaksasi otot katup kerongkongan bawah (lower esophageal sphincter). Akibatnya, risiko munculnya gejala refluks seperti sensasi terbakar di dada (heartburn), mual, hingga rasa pahit di pangkal tenggorokan dapat meningkat secara signifikan.

Sementara itu, bagi penyandang diabetes tipe 2 serta ibu hamil dengan indikasi diabetes gestasional, mengonsumsi buah secara tunggal dalam jumlah besar saat perut kosong sangat tidak disarankan. Meskipun buah kaya akan serat, vitamin, dan antioksidan, kandungan gula alaminya (fruktosa dan glukosa) tetap berpotensi memicu lonjakan kadar gula darah (glycemic spike) secara mendadak jika dicerna tanpa pendamping.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, kelompok ini sangat dianjurkan untuk menerapkan strategi macronutrient pairing, yaitu mengombinasikan konsumsi buah bersama makanan utama atau memadukannya dengan sumber protein dan lemak sehat seperti kacang-kacangan, biji-bijian, yogurt tanpa pemanis, atau telur. (far,ist/dya)

Buah-buahan yang Direkomendasikan

Pisang

Alasan: Rendah asam, serta kaya akan serat dan kalium yang berfungsi menjaga stabilitas fungsi saluran cerna dan melindungi dinding lambung.

Pepaya

Alasan: Mengandung enzim papain aktif yang membantu memecah protein, sehingga membuat proses pencernaan makanan utama menjadi lebih optimal dan ringan.

Melon & Semangka

Alasan: Memiliki kadar air yang tinggi dan tingkat keasaman (pH) yang sangat rendah, sehingga sangat menyegarkan dan aman dari risiko iritasi lambung.

Apel

Alasan: Mengandung serat larut air yang ramah bagi sistem pencernaan, dengan catatan pilihlah apel yang sudah matang sempurna dan rasanya manis.



Rekor Baru Dunia Satwa: Laba-Laba Australia Melesat Lampau Joking Manusia

Eksplosasi mengenai batas kemampuan fisik satwa kembali memecahkan rekor baru. Sebuah penelitian berskala makro yang menganalisis perilaku kinetik 258 spesies arachnida berhasil mengidentifikasi laba-laba pemburu (huntsman spider) dari genus Heteropoda asal Queensland, Australia, sebagai spesimen dengan kemampuan lari tercepat di dunia.

Kecepatan gerak satwa ini dilaporkan mampu melampaui rata-rata kecepatan kalkulasi fisik manusia saat melakukan olahraga lari santai (joging).

Berdasarkan data empiris yang dihimpun dalam laporan pracetak yang dipublikasikan melalui ScienceAlert, laba-laba pemburu tersebut mampu menembus kecepatan mekanis hingga 3,6 meter per detik, atau setara dengan 12,96 kilometer per jam.

Dalam teknik kalkulasi ketahanan fisik (endurance), performa mobilitas satwa ini setara dengan pace 4:37 per kilometer.

Angka tersebut secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan kecepatan rata-rata jogging manusia yang umumnya berada pada kisaran 6,4 hingga 9,6 kilometer per jam (pace 6 hingga pace 9).

Metodologi penelitian ini dilakukan secara presisi dengan



memanfaatkan k a n perangkat k a m e r a berkecepatan tinggi dan medium kertas berpetak di atas nampan khusus guna mengukur akselerasi titik ke titik. Melalui pendekatan biomekanik.

tim peneliti mengungkapkan bahwa signifikansi kecepatan ini tidak dipengaruhi oleh tingkat kerampingan kaki ataupun posisi bergerak satwa, melainkan berkorelasi kuat dengan rasio panjang kaki yang relatif dominan terhadap proporsi tubuh serta sejarah filogenetik (garis

keturunan) kelompok ekologisnya.

Laba-laba pemburu darat (ground-hunting spiders) secara evolusioner terbukti memiliki adaptasi motorik yang jauh lebih responsif karena tuntutan fungsional untuk mengejar mangsa secara aktif.

Secara taksonomi, temuan ini sekaligus memperbarui peta komparasi fauna tercepat. Sebelumnya, rekor gerakan terapis berkecepatan tinggi dipegang oleh laba-laba flic-flac asal Maroko (Cebrennus rechenbergi) dengan catatan 1,7 meter per detik.

Namun, para ahli biomekanik hewan dari Imperial College London

menegaskan bahwa pergerakan roda atau salto pertahanan diri yang dilakukan oleh spesimen Maroko tersebut secara teknis tidak dikategorikan sebagai mekanisme berlari (running gait) murni seperti yang ditunjukkan oleh genus Heteropoda.

Lebih lanjut, riset ini memberikan konfirmasi substansial terhadap teori hukum fisika dalam biologi perkembangan.

Skala tubuh yang masif tidak menjadi jaminan mutlak bagi sebuah spesies untuk bergerak lebih cepat, karena adanya batasan limitasi energi otot terhadap hukum mekanika kuantitatif. (far,ist/dya)



HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"
PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI
OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)
PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)
REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)
REDAKTUR LUTFIYU HANDI, ARIEF SUKAPUTRA, MUHIBUDIN KAMALI

KORAN DIGITAL LENTERA TODAY
Terbit Senin - Jumat (12 Halaman)
download edisi digital pada web
www.lenteratoday.com
VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021



MEDIA TERVERIFIKASI

BIRO: SURABAYA: YOLANDA APRILLIA PRADITHA, AMANAH NUR ASIAH, JOKO PRASETYO I **SIDOARJO:** TEGUH A I **GRESIK:** ASEPTA YOGA P. (SERTIFIKASI WARTAWAN UTAMA) I **MOJOKERTO:** NUR HIDAYAH I **LAMONGAN:** L HANDI I **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA I **KEDIRI:** AIS I **JOMBANG:** SUTONO I **PASURUAN-PROBOLINGGO-PONOROGO:** IMAN SANTOSO I **BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI:** PURCAHYONO JULIATMOKO I **MADIUN:** WIWIET EKO PRASETYO (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA) I **MALANG RAYA:** SANTI WAHYU SANIA (SERTIFIKASI WARTAWAN MUDA), ISKANDAR Z. I **TRENGGALEK:** HERLAMBAANG I **MADURA RAYA:** SAHLAN KURNIAWAN I **NGAWI:** DIMAS RIDHO SURYO BASKORO I **DKI JAKARTA:** FUAD HASSAN I **LOMBOK BARAT:** MUHAYYAN I **PALANGKA RAYA:** NOVITA MASNIARI

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH I **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO UTOMO, ISKANDAR ZULKARNAIN I **SEKERTARIS** FITRIYANTI SUTAN, FARADITA NUR FADHILA
DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN, FADHILA I **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26, JL TENGGILIS TENGAH 4 I **TELP** 03187854491 I **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA I **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA I **TELP IKLAN** 031-87854491 I **NIB** 91205006801134 I **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal kewartawanan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal kewartawanan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

Denim Look Ala Fashionista, Mewah yang Sederhana

Evolusi gaya denim dalam panggung mode global kini tidak lagi terbatas pada kesan kasual yang monoton. Di tangan para pelaku mode dunia, wardrobe staple ini bertransformasi menjadi kanvas kreativitas melalui sentuhan eksperimental yang memadukan kenyamanan dan elegansi tingkat tinggi.

Melalui pergeseran tren yang dicatat berbagai media mode internasional, denim kini dirayakan sebagai simbol gaya personal yang berani dan dinamis.

Tren french-girl chic yang kerap diulas oleh Vogue dan Elle membuktikan bahwa denim mampu tampil mewah lewat kesederhanaan.

Padukan dengan Sepatu Merah Cerah

Mengambil inspirasi dari Jeanne Damas, formula celana jeans klasik dapat langsung naik kelas hanya dengan permainan kontras warna. Menambahkan sepasang strappy sandals berwarna merah menyala atau sepatu hak rendah (kitten heels) merah cerah memberikan kejutan visual yang memikat.

Kombinasi ini tidak hanya memperkuat nuansa kasual di siang hari, tetapi juga bertransisi dengan

sempurna menjadi gaya semi-formal ketika dipadukan bersama blus sutra dan potongan blazer yang terstruktur.

Gaya Abadi Kemeja Putih

Sementara itu, pendekatan abadi yang menggabungkan celana denim dengan kemeja putih longgar tetap menjadi favorit karena sifatnya yang universal. Tren global saat ini menekankan pentingnya aksesoris untuk menghindari kesan polos. Seperti yang dipopulerkan oleh Camille Yolaïne, gaya minimalis ini menjadi sangat bertenaga ketika disandingkan dengan statement bag berdesain unik serta jam tangan klasik. Sentuhan akhir berupa gulungan kasual pada lengan kemeja menciptakan siluet yang rileks, merefleksikan estetika effortless yang modern dan bersih.

Gaya dengan Jorts

Bagi mereka yang menyukai eksplorasi gaya jalanan (street style), jorts atau celana pendek denim berpotongan longgar yang terinspirasi dari era 90-an kembali mendominasi panggung urban. Kritikus mode sering menyoroti bagaimana teknik layering

atau penumpukan pakaian mampu mengubah jorts menjadi pakaian yang sangat modis.

Menumpuk kemeja tipis di bawah jaket berukuran besar (oversized) akan terlihat semakin seimbang dengan kehadiran statement belt atau ikat pinggang bergesper tegas di pinggang.

Penggunaan palet warna bumi atau monokromatik menjaga penampilan ini tetap terlihat matang tanpa terkesan berlebihan.

Canadian Tuxedo

Terakhir, formula denim-on-denim atau yang dahulu dikenal sebagai Canadian Tuxedo, kini kembali diakui sebagai puncak gaya yang berani. Kunci utama untuk menaklukkan tren ini terletak pada kontras tekstur dan detail pakaian.

Mengikuti arahan gaya Camille Charriere, memadukan jaket denim beraksen quilt atau rajutan tebal dengan celana pendek denim memberikan dimensi visual yang kaya. Penambahan elemen pendukung

seperti sepatu bot tinggi yang dipadukan dengan kaus kaki wol yang menyembul sedikit di atas mata kaki menegaskan bahwa denim mampu tampil sangat modis sekaligus fungsional di berbagai musim. (farist/dya)

Macam macam Jenis Kain Denim

Raw / Dry Denim (Denim Murni Tanpa Cuci)

Kelebihan:

Sangat awet dan menghasilkan efek pudar (fading) alami yang unik sesuai lekuk tubuh.

Kekurangan:

Kaku saat pertama kali dipakai dan riskan luntur (bleeding).

Washed Denim (Denim yang Sudah Dicuci/Dilembutkan)

Kelebihan:

Langsung lembut dan nyaman dipakai sejak awal; tidak mudah luntur.

Kekurangan:

Pola pudar sudah permanen dari pabrik dan bahan cenderung lebih cepat menipis.

Stretch Denim (Denim Campuran Spandek/Elastane)

Kelebihan:

Sangat lentur, fleksibel mengikuti bentuk tubuh, dan nyaman untuk bergerak.

Kekurangan:

Rentan melar/berubah bentuk seiring waktu dan usia pakai lebih pendek.



Drama Bos BGN: ...dari Hal 1

Publik kembali dikejutkan oleh pengunduran diri mendadak Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, pada Rabu pagi, 22 Juli 2026. Nanik berpamitan kepada Presiden Prabowo Subianto karena harus berfokus menjalani perawatan medis penyakit jantung di luar negeri.

Melalui keterangan tertulis di akun Facebook pribadinya, Nanik menyampaikan, "Saya sampaikan ke Presiden juga dengan beribu maaf sepertinya saya harus mundur sebagai Kepala BGN, demi kesehatan saya, dan karena presiden prihatin dan kasihan dengan saya, presiden menyetujui, namun saya diminta tetap ikut mengawasi BGN."

Ia mengklaim bahwa meski masa jabatannya singkat, ia telah meletakkan fondasi reformasi total di BGN, termasuk merombak lima pejabat eselon I dari kementerian berbeda, membentuk 11 tim evaluasi, serta memprioritaskan sasaran MBG ke kelompok 3B (balita, ibu menyusui, ibu hamil) dan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).

Nanik bahkan sempat berseloroh mengenai sosok penerusnya, "Insyaallah pengganti saya adalah 'adik saya' di mana saya bisa menewar kalau misalnya terjadi hal-hal yang menyimpang."

Namun, di balik alasan medis tersebut, pengunduran diri Nanik terbit di tengah pusaran dugaan korupsi yang sedang ditangani Kejaksaan Agung. Mantan Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, melalui kuasa hukumnya Krisna Murti, menuding Nanik terlibat dalam perubahan nama yayasan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di Madiun dan Bogor hingga tiga kali tanpa prosedur resmi.

Nanik secara tegas membantah tuduhan tersebut dan menyatakan tidak pernah terlibat dalam pengadaan barang dan jasa yang berpotensi koruptif sejak dilantik menjadi Wakil Kepala BGN pada 17 September 2025. Kepada Majalah Tempo ia menegaskan, "Apa kaitannya yayasan ini dengan saya? Silakan cek PPATK, apakah ada aliran uang dari yayasan ini kepada saya."

Dalam sinjar Total Politik ia juga menambahkan, "Kalau ada pengadaan-pengadaan, enak aja, gua enggak ikut. Pengadaan kan bulan Juni 2025. Selain enggak ikut, gue ini kagak pernah diajakin rapat."

Pihak Kejaksaan Agung melalui Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarif Sulaeman Nahdi, menyatakan penyidikan terus berjalan dan menegaskan, "Semua orang yang mengetahui, mengalami, itu berpotensi diperiksa sebagai saksi."

Hanya dalam hitungan jam setelah mundurnya Nanik, Presiden Prabowo bergerak cepat melantik Sudaryono di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu sore, 22 Juli 2026. Pelantikan kilat yang

dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan jajaran Kabinet Merah Putih ini memicu keprihatinan publik.

Pasalnya, Nanik sendiri baru dilantik pada 8 Juni 2026 menggantikan Dadan Hindayana yang dicopot usai ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam kasus korupsi tata kelola MBG bersama pejabat BGN lainnya, termasuk Sekretaris Deputy BGN Brigjen Lalu Muhammad Iwan dan mantan Wakil Kepala BGN Lodewyk Pusung. Artinya, hanya dalam kurun waktu 45 hari, BGN telah mengalami dua kali perombakan kepemimpinan di tingkat puncak.

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan alasan di balik keputusan cepat Istana untuk segera melantik pimpinan baru tanpa jeda. Prasetyo menegaskan bahwa BGN merupakan institusi dengan tugas strategis yang tidak dapat dibiarkan mengalami kekosongan kepemimpinan.

Ia menekankan bahwa Sudaryono telah mengawal program MBG sejak masih berupa gagasan hingga konsep teknis sewaktu menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian, seraya menjelaskan, "Badan Gizi Nasional yang kegiatannya memberikan Makan Bergizi Gratis itu tidak pernah lepas dari tugas beliau di Kementerian Pertanian karena bagaimana pun juga, sumber-sumber bahan baku, sumber-sumber bahan pangan Makan Bergizi Gratis itu di-support dan ditopang dalam ekosistem oleh Kementerian Pertanian."

Usai dilantik, Sudaryono memberikan pernyataan resmi untuk menepis isu perburuan rente maupun penguasaan dapur SPPG di lingkungan pejabat BGN. Mengawali tanggapannya, ia menyampaikan, "Saya hari ini sebagaimana tadi sudah dilaksanakan acara pelantikan dan secara resmi telah menjadi Kepala Badan Gizi Nasional yang per hari ini kemudian saya telah aktif... Tentu saja saya di momen kesempatan yang baik ini mengucapkan bersyukur dan juga innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Artinya, segala sesuatu berasal dari Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah."

Ia secara spesifik membantah tuduhan konflik kepentingan dengan menegaskan, "Nggak ada, nggak ada, saya tak punya SPPG, saya tak punya dapur, tidak. Tidak ada keluarga saya yang punya dapur SPPG... Kami zero tolerance praktik korupsi dan hengkang pengki."

Sudaryono berjanji membenahi transparansi serta digitalisasi anggaran, "Ini anggaran besar dan harus diperuntukkan untuk rakyat, yang tidak transparan dibuat transparan. Yang manual dibuat tidak manual atau digital dan ada record-nya. Yang sembunyi-sembunyi, tidak boleh terjadi dan segalanya harus terang benderang."

Ia bahkan menegaskan akan menolak serta melaporkan ke aparat penegak hukum siapa pun yang

mengatasnamakan kerabat atau "orang dekat"-nya untuk meminta jatah prioritas proyek MBG.

Kendati Sudaryono menjanjikan pembenahan, rekam jejaknya memperlihatkan kedekatan politik yang sangat pekat dengan pusat kekuasaan ketimbang kapasitas meritokrasi di bidang gizi. Mantan asisten pribadi Prabowo Subianto sejak 2010 ini merupakan politikus Partai Gerindra yang pernah menjabat Wakil Sekretaris Jenderal hingga Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah.

Di luar ranah politik, portofolio kepemimpinannya mencakup jabatan Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI), Ketua Dewan Pembina Pedagang Pejuang Indonesia Raya (PAPERA), Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), serta Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).

Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan ke KPK per 29 Maret 2026, Sudaryono mencatatkan total harta kekayaan sebesar Rp31,39 miliar (Rp31.394.894.928) yang didominasi Kas dan Setara Kas senilai Rp13,34 miliar, Surat Berharga Rp7,64 miliar, serta Aset Bergerak dan Tanah/Bangunan Rp1,07 miliar, di samping beban utang tercatat sebesar Rp60,36 miliar.

Keraguan Pengamat: Tak Berdasar Meritokrasi

Penunjukan figur politik yang minim latar belakang gizi klinis ini langsung menuai kritik pedas dari para peneliti dan pengamat kebijakan publik. Ahli Kebijakan dan Kesehatan Pangan di MBG Watch, Isnawati Hidayah, menilai penunjukan Sudaryono tidak didasarkan pada meritokrasi melainkan nepotisme dan kedekatan jejaring politik.

Isnawati menegaskan, "Dia itu politikus, pengusaha, dan dari Partai Gerindra. Dia [ditunjuk] bukan berdasarkan meritokrasi atau capable [mampu], tapi karena nepotisme."

Lebih lanjut, Isnawati juga menggarisbawahi kegagalan tata kelola serta alpa dilakukannya audit independen dengan menyatakan, "Artinya mau seperti apa program makan bergizi gratis di Indonesia dan yang paling penting tata kelolanya sudah salah dari awal, ditambah para pemimpinnya tidak memiliki kepakaran dan meritokrasi di bidang itu... Yang paling basic, evaluasi dan audit. Sudah satu tahun lebih MBG secara serampangan berjalan. Kami masyarakat sipil menginginkan ada evaluasi, katanya saat libur sekolah, tapi faktanya tidak ada perubahan."

Pernyataan ini relevan mengingat lonjakan kasus keracunan yang sangat drastis, di mana Komnas HAM mencatat 449 kejadian luar biasa keracunan pangan yang berdampak pada 38.000 orang, sementara JPPI mencatat 33.626 pelajar mengalami keracunan dalam

PR Utama Program MBG

- **Benahi Tata Kelola:**
Perkuat transparansi anggaran, cegah korupsi, dan digitalisasi pengadaan.
- **Tertibkan SPPG Bermasalah:**
Tutup dapur yang tidak sesuai prosedur atau berkonflik kepentingan.
- **Pemerataan SPPG:**
Prioritaskan daerah 3T dan wilayah dengan stunting tinggi.
- **Keamanan Pangan:**
Cegah kasus keracunan melalui pengawasan kualitas makanan.
- **Audit Independen:**
Buka audit gizi dan keuangan secara transparan.
- **Efisiensi Anggaran:**
Sesuaikan belanja dengan kebutuhan riil daerah.
- **Fokus pada Kualitas Gizi:**
Utamakan pemenuhan gizi, bukan sekadar penyediaan makanan.



kurun waktu 1,5 tahun pelaksanaan MBG.

Senada dengan MBG Watch, Direktur Riset Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Media Askar Wahyudi, menggarisbawahi adanya konflik kepentingan politik yang kental dalam tata kelola BGN. Askar menyoroti bahwa penunjukan Sudaryono tak lepas dari afiliasi politik dapur MBG dengan menyatakan, "Kalau dilihat dari kacamata tata kelola kelembagaan, tidak masuk... Padahal sebetulnya kan, lokasi SPPG itu asal-asalan karena BGN juga. Jadi bukan awalnya SPPG terbentuk karena desain kebijakan yang tepat, tapi afiliasi dan konflik kepentingan."

Hal ini sejalan dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mencatat setidaknya tujuh yayasan pengelola dapur MBG terafiliasi dengan Partai Gerindra, serta ketimpangan lokasi dapur SPPG di mana wilayah angka stunting tertinggi seperti Papua memiliki kurang dari 1% dari total 27.469 unit SPPG, sedangkan Pulau Jawa menguasai 53%.

Askar bahkan menantang pimpinan baru untuk berani mengambil keputusan radikal, "Jadi, solusinya, hentikan semua [SPPG bermasalah]. Meskipun, saya rasa enggak mungkin berani secara politik." Menurut hitungan CELIOS, jika lokasi SPPG ditata ulang secara rasional berbasis kebutuhan daerah stunting dan 3T, anggaran MBG sejatinya hanya membutuhkan Rp67 triliun per tahun, bukan Rp287 triliun. (wid,ist,bbc,rls,ant/dya)

Bank Indonesia Ganti Jurus Jaga Rupiah

BI RATE DITAHAN, INSENTIF INVESTASI ASING DIGELONTORKAN

Bank Indonesia (BI) memutuskan mempertahankan suku bunga acuan (BI-Rate) di level 5,75 persen pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Juli 2026. Di tengah tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan ketidakpastian global, bank sentral memilih memperkuat berbagai instrumen non-suku bunga dibanding kembali menaikkan BI-Rate.

Pergerakan BI-Rate Sepanjang 2026

- Januari–April 2026
4,75% | Stabil (level terendah)
- Mei–Awal Juni 2026
5,50% | Mulai naik agresif
- Akhir Juni–Juli 2026
5,75% | Naik ke puncak sementara
- Proyeksi Akhir Tahun 2026
6,75%* | Berpotensi terus meningkat

*Berpotensi



Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. (Dok. Antara)

"Itu lebih efektif karena efektivitasnya lebih tinggi. Kalau kita hitung dengan insentif, investasi portofolio ini lebih tinggi daripada kenaikan 25 basis poin itu," katanya.

Sebagai bagian dari strategi tersebut, BI menaikkan premi Swap Jual Lindung Nilai maupun Swap Beli Lindung Nilai kepada BI dari 10 persen menjadi 12,5 persen. Selain itu, bank sentral juga memperkenalkan insentif baru untuk instrumen Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) Jual Lindung Nilai sebesar 15 persen.

Perry menilai kebijakan itu akan menarik lebih banyak investasi portofolio asing, memperdalam pasar uang dan pasar valuta asing domestik, sekaligus menjaga stabilitas rupiah tanpa memicu kenaikan suku bunga kredit.

"Kenaikan insentif swap dari 10 persen menjadi 12,5 persen, dan pemberian insentif bagi DNDF menjadi 15 persen itu lebih efektif. Ini lebih efektif mengendalikan nilai tukar dan karena itu memperkuat inflasi, mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan fiskal, serta kesehatan korporasi," ujarnya.

Keputusan mempertahankan BI-Rate juga didukung kondisi domestik. Sejak Mei 2026, BI telah menaikkan suku bunga acuan secara kumulatif 100 basis poin untuk merespons pelemahan rupiah. Bank sentral kini memilih menunggu dampak dari pengetatan tersebut terhadap perekonomian.

Di sisi lain, hasil Survei Perbankan BI menunjukkan permintaan kredit baru pada kuartal II 2026 meningkat signifikan. Saldo Bersih Tertimbang (SBT) permintaan kredit mencapai 93,08 persen, naik dari 38,74 persen pada kuartal sebelumnya, sementara

penyaluran kredit diperkirakan masih tumbuh pada kuartal III.

Meski demikian, perbankan masih cenderung selektif menyalurkan kredit. Hal itu tercermin dari Indeks Lending Standard (ILS) sebesar 1,03, yang menunjukkan standar pemberian kredit masih diperketat melalui penyesuaian suku bunga, plafon, tenor, hingga biaya persetujuan kredit.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk, Josua Pardede, menilai tambahan kenaikan suku bunga hanya akan memberi dampak terbatas terhadap inflasi, tetapi berpotensi memperbesar biaya kredit dan menekan aktivitas sektor riil. Karena itu, penguatan instrumen non-suku bunga dinilai lebih tepat dalam kondisi saat ini.

Dorong Transaksi Mata Uang Lokal

Selain memperluas insentif bagi investasi portofolio asing, BI juga memperkuat penggunaan Local Currency Transaction (LCT) dengan enam negara mitra, yakni Jepang, China, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab.

Dalam kebijakan tersebut, BI memberikan tambahan premi Swap Beli Lindung Nilai sebesar 10 persen serta pengurangan premi DNDF Jual Lindung Nilai sebesar 10 persen bagi transaksi yang menggunakan skema LCT.

"Local Currency Transaction adalah bagaimana diversifikasi pembayaran perdagangan dan investasi. Kita sudah banyak kemajuan dengan Jepang, China, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab. Dengan diversifikasi pembayaran perdagangan dan investasi, ini akan mengurangi

permintaan terhadap dolar," kata Perry.

Menurutnya, penggunaan mata uang lokal seperti yen dan yuan dalam perdagangan serta investasi akan mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS sekaligus memperdalam pasar valuta asing domestik.

Selain menjaga stabilitas rupiah, BI juga memperkuat dukungan terhadap sektor perbankan melalui peningkatan insentif likuiditas makroprudensial. Besaran insentif yang dapat diterima bank dinaikkan menjadi maksimal 6 persen dari Dana Pihak Ketiga (DPK), dari sebelumnya 5,5 persen.

Tambahan ruang likuiditas tersebut diharapkan memperbesar kapasitas perbankan dalam menyalurkan kredit ke sektor prioritas seperti manufaktur, UMKM, hilirisasi, dan pembiayaan berkelanjutan.

BI juga mengubah skema pemberian insentif. Selain diberikan kepada bank yang aktif menyalurkan kredit, sebagian insentif akan dialokasikan kepada bank yang mempertahankan kepemilikan Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Di sisi pendalaman pasar uang, BI memperluas jenis surat berharga yang dapat digunakan sebagai agunan transaksi repo. Mulai akhir September 2026, selain SBN, obligasi maupun sukuk yang diterbitkan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) juga dapat digunakan dalam operasi moneter maupun pengelolaan likuiditas syariah.

Menurut Perry, seluruh kebijakan tersebut merupakan bagian dari bauran kebijakan BI untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah tingginya ketidakpastian global, sekaligus memastikan inflasi tetap berada dalam sasaran 2,5 persen $\pm$ 1 persen pada 2026–2027 tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi maupun penyaluran kredit.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengapresiasi keputusan Bank Indonesia (BI) yang mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate di level 5,75 persen. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga momentum sektor riil sekaligus mendorong pertumbuhan kredit perbankan.. (gus,ktn,blo/dya)

Keputusan tersebut berbeda dari ekspektasi sebagian pelaku pasar. Berdasarkan konsensus Bloomberg terhadap lebih dari 30 ekonom dan analis, median proyeksi memperkirakan BI akan menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6 persen. Namun, BI memilih mempertahankan suku bunga sambil memperbesar insentif untuk menarik aliran modal asing.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan Dewan Gubernur mempertimbangkan dua pilihan kebijakan, yakni menaikkan BI-Rate yang berpotensi mendorong kenaikan bunga perbankan atau meningkatkan insentif bagi investor portofolio asing. BI akhirnya memilih opsi kedua.

"Pada hari ini memang Bank Indonesia di sini ada dua pilihan, apakah menaikkan BI-Rate dengan konsekuensi suku bunga dalam negeri juga akan naik, atau yang kami lakukan hari ini di Dewan Gubernur, tidak menaikkan BI-Rate, tetapi meningkatkan insentif bagi semakin masuknya aliran portofolio asing," ujar Perry Rabu (23/7/2026).

Menurut Perry, kebijakan tersebut lebih efektif dibandingkan menaikkan BI-Rate sebesar 25 basis poin karena mampu menjaga stabilitas nilai tukar tanpa membebani sektor riil melalui kenaikan biaya pinjaman.